

KAPASITAS DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS

Novia Rindani¹, Februati Trimurni²

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: noviarindani@students.usu.ac.id¹, februati@usu.ac.id²

Abstract: *Traffic Control is a form of effort made by the government in ensuring the smooth flow of traffic. This study aims to determine and describe the capacity of the Binjai City Government Transportation Office in traffic supervision. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The results showed that the capacity of the Binjai City Government Transportation Office in Traffic Supervision was still not optimal. This can be seen from the need to improve the quality of human resources; inadequate infrastructure, technology and financial resources to support performance; strategic leadership has not been carried out to the fullest; programs and process management have not been effective and relations and cooperation with other parties have not been optimal. The Transportation Office of the Binjai City Government needs to increase capacity in traffic monitoring in Binjai City.*

Keywords: *Capacity, Traffic Control.*

Abstrak: Pengawasan Lalu Lintas merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin kelancaran arus lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia; infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan belum memadai dalam mendukung kinerja; kepemimpinan strategis belum dilakukan secara maksimal; program dan manajemen proses belum efektif serta hubungan dan kerjasama dengan pihak lain belum optimal. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai perlu melakukan peningkatan kapasitas dalam pengawasan lalu lintas di Kota Binjai

Kata kunci: Kapasitas, Pengawasan Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem perangkutan nasional menempati posisi vital dan strategis dalam pembangunan nasional. Pengaruh kelancaran perangkutan dan dampaknya secara langsung dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan angkutan dan lalu lintas melibatkan dan menyangkut kepentingan banyak pihak. Oleh karena itu, sering menimbulkan benturan kepentingan

antara pihak satu dengan pihak lainnya. Sementara itu, tuntutan akan kecepatan angkutan dan kelancaran lalu lintas menjadi tuntutan bersama yang mungkin saling berbenturan, perlu ada peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak (Warpani, 2002:11).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian

dariupaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan dari Undang-Undang ini adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sektor transportasi mempunyai peran yang penting dalam proses pembangunan karena dapat membantu kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas penduduk maupun barang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kawasan.

Dilansir dalam [cnn.indonesia](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210203115349-384-601700/sensus-kendaraan-di-indonesia-lebih-dari-133-juta-unit) dinyatakan bahwa berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah populasi kendaraan di Indonesia lebih dari 133 juta unit per 2019, sejak dua tahun belakangan jumlah kendaraan meningkat sekitar 5 persen (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210203115349-384-601700/sensus-kendaraan-di-indonesia-lebih-dari-133-juta-unit> diakses pada 21 Juli 2021). Dijelaskan secara terperinci data per 2019 menyebutkan bahwa jumlah kendaraan naik menjadi 133.617.012 unit dari sebelumnya 2018 sebanyak 125.508.776 unit. Hal ini menimbulkan dampak yang serius yaitu kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor.

Penulis melihat bahwa pengawasan lalu lintas di Sumatera Utara tepatnya di Kota Binjai masih terdapat masalah. Kondisi lalu lintas Kota Binjai terutama di kawasan inti Kota terkesan semrawut. Hal ini dilihat dari masih ditemukan berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat dan pengguna kendaraan, baik yang disengaja maupun

tidak. Di kawasan jalur satu arah masih terdapat pengendara sepeda motor, becak motor, maupun pedagang kaki lima pengguna gerobak melintasi jalan tersebut. Kondisi tersebut juga diakibatkan tidak adanya polisi maupun petugas dari Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan disekitaran jalan tersebut. Kesemrawutan lainnya juga terlihat di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sultan Hasanudin, Jalan Wahid Hasyim, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Situasi tersebut disebabkan penumpukan kendaraan, yang kerap terjadi pada siang hingga sore hari. Selain itu, sistem parkir berlapis dan banyaknya angkutan umum yang memilih mangkal di sekitar lingkungan sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kompleks pertokoan, menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut menjadi macet (<https://www.metro-online.co/2017/11/kondisi-lalin-kota-binjai-semrawut.html> diakses pada 21 Juli 2021). Selain itu, semenjak adanya transportasi berbasis online juga semakin mengalami kemacetan dan kepadatan pengguna jalan.

Penulis melihat bahwa jumlah kendaraan yang ada di Kota Binjai terus bertambah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020 dapat diketahui jumlah kendaraan bermotor mobil penumpang 1.752 unit, jumlah kendaraan bermotor bus 40 unit, jumlah kendaraan bermotor truk 718 unit, jumlah kendaraan bermotor sepeda motor 16.744 unit dengan total keseluruhan 19.253 untuk tahun 2020.

Penulis menemukan permasalahan lain mengenai pengawasan lalu lintas di kota Binjai yakni kapasitas Dinas Perhubungan Kota Binjai yang masih kurang dari segi kualitas dan kemampuan sumber daya manusia aparatur teknis dalam melakukan tugas dan fungsinya. Berikut daftar pegawai Dinas Perhubungan Kota Binjai berdasarkan latar belakang pendidikan teknis.

No	Pendidikan Teknis	Jumlah	Keterangan
1	Diploma III LLAJ	1	Staf MRL
2	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	5	Dasar 3 orang staf PKB
			Lanjutan I 1 orang
			Lanjutan II 1 orang Kepala UPTD
3	Diklat PPNS	-	-
4	Keselamatan Transportasi	2	Staf
5	Manajemen Perencanaan Transportasi	1	Kepala Seksi
6	Manajemen Transportasi	1	Staf

Gambar. Daftar Pegawai Dinas Perhubungan Kota Binjai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis

(Sumber: Data Pegawai Dinas Perhubungan Kota Binjai, 2021)

Kemudian infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan yang tersedia di kantor belum optimal. Didalam satu ruangan terdapat beberapa pegawai dengan fasilitas yang kurang memadai seperti belum tersedianya komputer dimasing-masing meja kerja, susunan meja kerja dalam ruangan yang belum tertata dengan baik, meja dan kursi yang tidak layak digunakan dan lain sebagainya. Kemudian anggaran yang masih minim serta sarana dan prasarana dilapangan juga belum memadai, disebutkan bahwa terminal yang ada saat ini masih menyewa lahan milik PT.KAI. Selanjutnya berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti pada salah satu pegawai Dinas Perhubungan Kepala Seksi Lalu Lintas mengatakan bahwa terdapat kendala dalam pengawasan lalu lintas yang disebabkan kurang jelas aturan tentang pengawasan lalu lintas yang ada di Dinas Perhubungan Kota Binjai. Beliau mengatakan, pegawai Dinas Perhubungan Kota Binjai hanya bepedoman pada peraturan yang telah ada sebelumnya dan tidak ada program yang jelas untuk pengawasan lalu lintas di Kota Binjai. Selain itu sumber daya manusia yang ada masih kurang dalam pengawasan lalu lintas.

Penulis menggunakan teori kapasitas Horton et.al. (2003:23-25) sebagai pedoman penelitian ini. Kapasitas

dapat diartikan sebagai kemampuan individu, kelompok atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dilihat dari indikator sumber daya manusia, infrastruktur; teknologi dan sumber daya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen proses, kerjasama dan hubungan dengan pihak lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti merumuskan masalah yakni “Bagaimana Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas?”.

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci mengenai Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas.

METODE

Penulis menggunakan bentuk penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2021:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realitas dari masalah yang akan dielaborasi oleh penulis dengan menggunakan data-data yang didapatkan. Penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menentukan informan dalam penelitian

ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk memperoleh informasi yang akurat. Kriteria informan penelitian ini adalah Dinas Perhubungan dan masyarakat sebagai pengguna lalu lintas. Maka dengan itu penulis memilih informan penelitian yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Bidang Angkutan dan Prasarana, Kepala Seksi Prasarana, Kepala Seksi Angkutan Orang, Kepala Seksi Lalu Lintas dan masyarakat pengguna lalu lintas di Kota Binjai. Selanjutnya setelah informasi dikumpulkan, penulis melakukan analisis data. Penulis menggunakan teknik analisis data yakni teknis analisis data menurut Sugiyono (2021:131) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya teknik keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yakni data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Disebutkan juga bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Salah satu peran Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang perhubungan yakni sebagai pengawas Lalu Lintas. Ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai. Dinas Perhubungan Kota Binjai dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan salah satunya melakukan pengawasan serta pengendalian operasional Lalu Lintas dengan baik, namun nyata kapasitas Dinas Perhubungan juga kurang mampu untuk mengawasi atau mengendalikan kelancaran Lalu Lintas di Kota Binjai. Pengawasan sangat penting dilakukan dalam sebuah organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Dalam mewujudkan sistem pelayanan transportasi perkotaan yang aman, tertib, selamat dan lancar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Binjai 2016-2021 diperlukan pemahaman, kemampuan, kerjasama dan juga keterampilan baik individu maupun kelompok untuk meningkatkan kapasitas organisasi sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Untuk melihat kemampuan atau kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam melakukan pengawasan Lalu Lintas, peneliti menggunakan konsep Horton, et. al (2003:23-25) meliputi Sumber Daya (*Resources*) meliputi *staff members / personnel* (sumber daya manusia), *infrastructure, technology, and financial resources* (infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan) dan Manajemen (*Management*) meliputi *Strategic Leadership* (kepemimpinan strategis), *Program And Process Management* (program dan manajemen proses), *Networking And Linkages* (jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain).

Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu

Lintas dilihat dari indikator-indikator di atas dapat diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi dan juga dokumentasi peneliti dengan berbagai informan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia (staff members / personnel)

Sumber daya manusia misalnya, mengacu pada hal-hal seperti prosedur rekrutmen dan jumlah serta keterampilan anggota staf, tingkatan staf, serta penilaian kinerja kinerja (Horton, 2003:25-27). Dibentuknya satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia dimaksudkan bukan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui sumber daya manusia.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kota Binjai. Tercapainya tujuan sebuah organisasi dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang memberikan kontribusi yang maksimal dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga menentukan tujuan organisasi dapat berjalan efektif atau tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Binjai sudah cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, penulis melihat ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan, jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan SDM

dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan.

Penulis melihat latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kota Binjai juga sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dilihat latar belakang pendidikan yang beragam mulai dari SD, SMP, SMA, D-III, S-1, S-2 serta pendidikan teknis dan bekerja sesuai bidangnya. Namun berdasarkan latar pendidikan teknis masih kurang.

Dinas/Instansi Pemerintahan Government Agencies	SD Primary School	SMP Junior High School	SMA Senior High School	D-III	S1	S2	Jumlah Total
Dinas Perhubungan	2	1	11	7	35	3	59

Gambar. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan di Kota Binjai Tahun 2020

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2021)

Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan organisasi tersebut melalui orang mulai dari proses rekrutmen, penempatan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta penilaian kinerja. Hal ini sesuai dengan konsep Sedarmayanti (2009:13) yang mengartikan manajemen sumber daya manusia (MSDM) sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian dengan untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang.

Penilaian kinerja pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kota Binjai dilaksanakan setiap tahunnya berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan 60% Penilaian SKP dan

40% Penilaian Perilaku Kerja.

Grindle (1997:96), menjelaskan bahwa dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi tercapai. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup tentang tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun informal dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai. Dinas Perhubungan Kota Binjai setiap tahunnya mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai yang diadakan oleh Badan Diklat Kementerian Perhubungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Grindle (1997:96) menjelaskan bahwa upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun informal dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi tercapai, misalnya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkala kepada sumber daya aparatur. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup tentang tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menginterpretasikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Binjai sudah tercukupi dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam pengawasan lalu lintas di Kota Binjai. Dilihat dari

pegawai yang bekerja di kantor dan di lapangan sudah mencukupi dilihat dari pengawasan yang dilakukan petugas lapangan yaitu pada pagi hari, sore hari, hingga malam hari atau 24 jam penuh, sistem penilaian kinerja berdasarkan Satuan Kinerja Pegawai, pendidikan dan pelatihan yang diadakan setiap tahunnya walaupun pada masa pandemi saat ini pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia belum pernah diadakan sebab keterbatasan dana. Dengan demikian, sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas sudah dikatakan mencukupi. Namun sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan kualitas lagi guna tercapainya kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas di Kota Binjai.

Infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan (infrastructure, technology, and financial resources)

Ketersediaan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan menjadi komponen penting selain sumber daya manusia dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kodoatie (dalam Suryatin,dkk 2019:46) ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Infrastruktur menjadi sebuah sistem yang menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan yang ada pada organisasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam melakukan pengawasan lalu lintas di lapangan sudah mencukupi, yaitu dilihat Kota Binjai sendiri dijuluki sebagai “Hutan Rambu” sebab memiliki kelengkapan di lapangan meliputi traffic light, warning light, marka jalan, rambu lalu lintas. Selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Binjai sudah memiliki *Command Center Room (CCRoom)*

seperti ATCS yang fungsinya memantau dan mengendalikan Lalu lintas dengan CCTV dengan audio yang terkomando di Dinas Perhubungan. Meskipun demikian, ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang ada pada kantor Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam melakukan pengawasan lalu lintas kurang memadai, yaitu masih terdapat fasilitas yang tidak layak pakai seperti meja dan kursi lipat pegawai. Selain itu teknologi yang tersedia seperti komputer untuk pegawai masih minim menyebabkan antara pegawai satu dan lainnya harus bergantian.

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	3	Baik
2	Mobil Pick Up	2	Baik/Cukup
3	Sepeda Motor	1	Baik
4	Laptop	8	7 Baik, 1 Rusak Berat
5	Printer	14	12 Baik, 2 Rusak Berat
6	Komputer Pentium IV	8	7 Baik, 1 Rusak Berat
7	Meja Kerja	6	4 Baik, 2 Rusak Berat
8	Kursi	1	Baik
9	Pillang Kabin	16	Baik
10	Pengantar Kertas	9	6 Baik, 3 Rusak Berat
11	Lemari Gantung	3	Baik
12	Lemari	18	15 Lemari Kaca, 3 Pak. Baku
13	Kursi Lipat/Plastik	20	13 Kursi Plastik, 7 Kursi Lipat
14	Kursi Putar	28	Baik
15	Telera	1	Baik
16	Pesawat Telipon	1	Baik
17	Pesawat HT	20	9 Baik, 10 Rusak Berat, 1 Hilang
18	AC	15	13 Baik, 2 Rusak Berat
19	Dispenser	2	Baik
20	Meja L.	1	Baik
21	Meja Rapat	2	Baik
22	Meja Yu Bim	37	27 Baik, 10 Rusak Berat
23	Meja 1 Bim	9	3 Baik, 6 Rusak Berat
24	Kipas Angin	4	4 Rusak Berat
25	Penghang Dapur	1	Baik
26	Handphone	2	1 Baik, 1 Rusak Berat
27	Inflator	1	Baik
28	SPK	1	Baik
29	Tenda	1	Baik
30	Almiseri	1	Baik
31	Tempayan	1	Baik
32	Sesmer Canon 4400	1	Baik
33	Camara Digital	1	Baik
34	Tabak	1	Cukup
35	Kalkulator	7	Cukup
36	Alat-alat 101 PDB	13	Cukup
37	CCTV/Zoom	1	Baik

No	Uraian	Status	Jumlah
1	Rambu-rambu Lalu Lintas	Ebaik	1197
2	Traffic Cone	Ebaik	600
3	Marka Jalan	M	1.939,3
4	Guardrail / pagar Pengaman	Ebaik	3
5	Traffic Light	Ebaik	9
6	Warning Light	Ebaik	43
7	Rambu Perahu Pengaman Jalan (PFP)	Ebaik	82
8	Rambu Lalu Lintas Tanggung	Ebaik	41
9	Rambu Lalu Lintas Tanggung	Ebaik	389
10	Plank Nama Jalan (KTL)	Ebaik	180
11	Papan Nama Jalan	Ebaik	843
12	Conin	Ebaik	10
13	Halte	Ebaik	86
14	Shelter	Ebaik	71
15	Rambu TPD	Ebaik	100
16	Delimitator	Demang	1235

Gambar. Daftar Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022)

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis melihat bahwa ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Binjai secara keseluruhan masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapat sarana dan prasana yang rusak dan kurang layak pakai namun masih tetap digunakan. Infrastruktur dan teknologi merupakan salah satu sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Grigg (dalam Suryatin,dkk 2019:46) infrastruktur dibutuhkan sebagai suatu sistem dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. . Dalam hal ini ketersediaan dan kondisi infrastruktur dan teknologi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Binjai menjadi salah

satu komponen pendukung dalam keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Binjai melaksanakan pengawasan lalu lintas di Kota Binjai.

Selain infrastruktur dan teknologi dalam mendukung pengawasan lalu lintas di Kota Binjai, sumber daya keuangan juga menjadi komponen penting dalam keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas di Kota Binjai. Dalam 2 tahun belakangan, Dinas Perhubungan Kota Binjai minim akan dana sebab terdapat potongan anggaran disebabkan karena pandemi Covid-19. Dalam hal ini penulis tidak mendapatkan rincian anggaran yang pasti tentang anggaran Dinas Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas, namun peneliti hanya mendapatkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai berdasarkan yang tercantum dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai Tahun 2021, sebagai sumber anggaran dalam pendanaan pengawasan lalu lintas di Kota Binjai. Sehingga peneliti tidak dapat menjelaskan lebih rinci mengenai anggaran dalam pengawasan lalu lintas di Kota Binjai yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai.

Jenis Pendapatan/ Kind of Revenue	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Regional	78.836.498.877,48	78.716.706.646,89	70.611.069.606,00	76.970.022.676,62
1.1 Pajak Daerah	46.439.663.462,38	47.060.043.182,62	53.366.38.926,64	65.688.257.926,38
1.2 Retribusi Daerah	4.907.246.694,00	4.438.100.420,00	4.694.413.730,00	3.656.189.990,00
1.3 Hasil Perolehan Hak Milik Daerah dan Pengelolaan Kawasan Daerah yang Dapat Dihasilkan	3.382.642.489,00	5.687.816.160,00	3.400.955.458,00	3.509.950.764,00
1.4 Lain-lain PAD Sbb	24.009.946.232,10	17.629.687.184,27	9.150.661.699,36	4.703.324.359,24
2. Dana Perimbangan	689.480.970.873,16	747.174.448.618,00	722.172.207.268,00	668.811.216.600,00
2.1 Bagi Hasil Pajak	33.390.166.814,00	16.363.562.363,00	16.764.724.463,00	21.120.275.890,00
2.2 Bagi Hasil Pajak Daerah	920.628.036,00	3.694.879.665,00	3.650.000.000,00	3.650.000.000,00
2.3 Dana Alokasi Umum	564.377.282.600,00	564.377.282.600,00	563.837.664.000,00	533.778.257.000,00
2.4 Dana Alokasi Khusus	100.753.593.319,16	125.936.136.655,00	119.766.918.765,00	108.912.483.150,00
3. Lain-lain Pendapatan ybs Sbb	7.000.000.000,00	18.123.486.408,00	80.910.082.679,00	73.030.627.199,00
Jumlah Total	816.170.638.604,48	841.013.641.971,89	843.694.389.640,00	816.811.988.770,62

Gambar. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2017-2020

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2021)

Berdasarkan gambar 4 di atas dapat diketahui sumber keuangan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah dari pemerintah yang berasal dari anggaran, pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sumber keuangan dan pendapatan dinas perhubungan kota

Binjai berasal dari parkir dan pajak kendaraan bermotor. Namun perlu ada data yang terperinci mengenai data anggaran pelaksanaan pengawasan lalu lintas di Kota Binjai sehingga adanya transparansi data anggaran tersebut sehingga kapasitas Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas menjadi lebih optimal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan secara keseluruhan peneliti menginterpretasikan bahwa infrastruktur dan teknologi yang tersedia di Dinas Perhubungan Kota Binjai secara keseluruhan belum memadai. Kondisi gedung kantor kurang memadai melihat jumlah sumber daya manusia yang ada, sehingga pegawai yang bekerja di kantor harus bersusun rapat. Kondisi meja dan kursi tidak layak masih digunakan, kondisi ruangan kerja yang sempit tanpa jarak antara satu meja dengan meja lainnya, kemudian antara ruangan satu dengan yang lainnya tidak tertutupi dengan penuh hingga atap yang menimbulkan suasana kebisingan dalam bekerja. Selain itu juga tersedia musholla, ruang ibu menyusui, gudang serta bank sampah. Dinas Perhubungan Kota Binjai juga mempunyai gedung untuk uji kendaraan bermotor terletak tepat disamping gedung kantor. Minimnya sumber daya keuangan yang dimiliki dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas yang disebabkan pandemi Covid-19 saat ini. Infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan dalam sebuah organisasi menjadi salah satu komponen yang dapat meningkatkan kapasitas Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam melakukan pengawasan lalu lintas di Kota Binjai sebab apabila Infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan tidak mendukung dan tidak memadai maka pelaksanaan suatu kegiatan tidak akan berjalan efektif.

Kepemimpinan Strategis (Strategic Leadership)

Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk menilai dan

menafsirkan kebutuhan dan peluang di luar organisasi, untuk menetapkan arahan, untuk mempengaruhi dan menyelaraskan orang lain menuju tujuan bersama, untuk memotivasi anggota dan berkomitmen untuk bertindak, serta membuat anggota bertanggung jawab atas kinerja mereka. Kualitas kepemimpinan organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap arahnya, motivasi stafnya, dan kinerjanya secara keseluruhan. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk menilai sejauh mana organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Evaluasi juga dapat digunakan untuk pembelajaran yang lebih mendalam dengan menilai kembali tujuan dan strategi dasar organisasi. Pemantauan dan evaluasi berkala yang ditujukan untuk peningkatan organisasi. Dalam hal ini kapasitas operasionalnya meliputi perencanaan strategis, kebijakan dan prosedur berorientasi kinerja, pembagian peran yang jelas, tanggung jawab, dan wewenang, struktur tata kelola serta pedoman dan insentif kinerja dalam kaitannya dengan tujuan organisasi (Horton, 2003:25-27).

Kepemimpinan strategis dalam sebuah organisasi dilihat sebagai kemampuan pemimpin dalam menetapkan arahan bagi anggotanya untuk memotivasi dan berkomitmen dalam melakukan pekerjaannya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang kuat terhadap arahnya suatu organisasi, motivasi anggotanya serta membuat anggota bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaannya. Suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan strategis adalah untuk mempersiapkan organisasi menghadapi apa pun yang mungkin terjadi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis menemukan bahwa kepemimpinan strategis yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Binjai dapat dilihat dari hierarki kepemimpinan yakni Kepala Bidang, Kepala Seksi yang ada di

Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah pemimpin bagi bawahannya. Kepala Bidang maupun Kepala Seksi bertanggung jawab kepada atasan yakni Kepala Dinas sesuai peraturan yang berlaku. Pengambilan keputusan yang dilakukan setiap kepala bidang maupun kepala seksi berpengaruh penting bagi anggota untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Robert Dubin (dalam Sedarmayanti, 2009:259) bahwa kepemimpinan adalah aktivitas yang dilakukan pemegang kewenangan dan pengambil keputusan. Dengan demikian, kepemimpinan strategis dalam sebuah organisasi dilihat dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin.

Dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pimpinan dalam sebuah tingkat pada Dinas Perhubungan Kota Binjai tetap berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah yang dapat menghambat kinerja anggota dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas di kota Binjai. Dalam setiap bidang, Kepala Bidang sebagai pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Kepemimpinan strategis yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Binjai adalah dengan memberikan arahan setiap hari kepada anggota melalui upacara pagi setiap harinya. Selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam mewujudkan kepemimpinan strategis juga dilakukan dengan mengadakan evaluasi kinerja organisasi maupun individu. Evaluasi dilakukan sebagai pembelajaran

lebih mendalam dalam menilai serta memperbaiki kembali tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Evaluasi yang dilakukan juga memberikan tanggung jawab kepada individu sehingga dalam menyelesaikan pekerjaannya di masa depan menjadi lebih baik. Evaluasi kinerja juga akan membantu memberikan gambaran serta perencanaan yang lebih baik bagi sebuah organisasi ke depannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepemimpinan strategis yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Binjai belum optimal. Dilihat dari peran setiap kepala bidang maupun kepala seksi dalam mengawasi anggotanya hanya sebatas memberi arahan dan motivasi pegawai saat upacara pagi saja. Selain itu evaluasi yang dilakukan setiap kepala bidang ataupun kepala seksi dalam memberikan teguran melalui surat peringatan satu, dua dan tiga yang dilakukan saat anggota sudah melakukan kesalahan. Dalam hal ini disiplin pegawai yang baik akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, sedangkan apabila disiplin pegawai yang rendah akan memperlambat kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Evaluasi kinerja individu maupun organisasi secara berkala harus dilakukan guna meningkatkan kapasitas Dinas Perhubungan Kota Binjai menjadi lebih efisien dan efektif khususnya dalam pengawasan lalu lintas.

Kepemimpinan adalah kunci keberhasilan pada organisasi baik lingkup mikro maupun dalam pemerintahan negara. Kepemimpinan strategis memberikan efek positif bagi pemerintahan agar dapat lebih fleksibel, kreatif, dalam mengelola dan memotivasi sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, dengan mempertahankan kualitas kelembagaan dan memiliki kemampuan dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kepemimpinan strategis harus mampu memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, memandang jauh ke depan, bersikap fleksibel, dan memberdayakan orang lain dalam rangka membentuk perubahan strategis yang

diperlukan. Menurut Rodiah (dalam A.W.Cahyono, D.Guyana, 2021: 398) kepemimpinan strategis bertanggungjawab untuk menciptakan antara tuntutan lingkungan eksternal organisasi dengan visi, misi, strategi dan implementasi organisasi.

Dalam sebuah organisasi kepemimpinan seseorang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pada era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang setiap pemimpin harus lebih *up to date* terhadap permasalahan-permasalahan mengenai pelayanan publik, dimana peran pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menstabilkan setiap situasi dan keadaan yang sedang terjadi.

Program dan Manajemen Proses (Program And Process Management)

Manajemen proses ini sering menjadi hal utama dalam pengembangan kapasitas dalam organisasi, karena hal itu penting untuk penyampaian tujuan program yang efektif. Dalam hal ini kapasitas operasionalnya meliputi manajemen proyek, perencanaan dan perumusan program, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta komunikasi (Horton, 2003:25).

Dalam aspek program dan manajemen proses penulis melihat bagaimana Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam pengawasan lalu meliputi manajemen proyek, perencanaan dan perumusan program, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta komunikasi. Hal ini akan mendukung kapasitas Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas berjalan secara efektif atau tidak. program pengawasan lalu lintas yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Binjai belum ada hanya terbagi menjadi beberapa bagian meliputi, rekayasa lalu lintas, razia lalu lintas serta pengawasan lalu lintas di lapangan. Selanjutnya untuk perencanaan dan perumusan suatu program dilaksanakan setelah keluar Rencana Strategis Lima Tahun (RENSRA) Dinas Perhubungan. Tahap selanjutnya yakni pengelolaan dari program tersebut. Pengelolaan suatu program yang ada pada Dinas perhubungan Kota Binjai

dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan oleh legislatif atau DPRD. Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang telah tertera di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) wajib melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Penulis juga menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Binjai belum memiliki program yang jelas tentang pengawasan lalu lintas, kegiatan-kegiatan dalam pengawasan hanya sebatas rekayasa lalu lintas yang pelaksanaannya dilakukan saat keadaan mendesak dan belum mengikuti tahap-tahap seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disebutkan bahwa kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan. Selanjutnya manajemen proses berkaitan tentang bagaimana sebuah kegiatan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Selanjutnya penulis melihat bentuk pengawasan apasaja yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Binjai yakni berupa pos penjaga disetiap simpang yang menjadi rawan kemacetan di Kota Binjai. Rancangan dimulai dengan rapat, audiensi, perancangan dan di eksekusi yang dipimpin oleh kepala dinas, kepala bidang serta kepala seksi. Untuk pelaksanaan teknis pengawasan lalu lintas melalui pembagian kerja (*shift*), kemudian petugas pelaksana memiliki 3 *shift* setiap harinya dan bekerja secara bergantian. Pengawasan ini dilakukan selama 24 jam penuh, bahkan hari libur atau hari besar pengawasan tetap dilakukan. Berikut jadwal patroli, siaga dan off pada Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam melakukan pengawasan lalu lintas di lapangan.

No.	Tanggal	Hari	Patroli	Sosial	Off
1.	01 Januari 2022	Sabtu	3	1	2
2.	02 Januari 2022	Minggu	2	3	1
3.	03 Januari 2022	Senin	1	2	3
4.	04 Januari 2022	Selasa	3	1	2
5.	05 Januari 2022	Rabu	2	3	1
6.	06 Januari 2022	Kamis	1	2	3
7.	07 Januari 2022	Jumat	3	1	2
8.	08 Januari 2022	Sabtu	2	3	1
9.	09 Januari 2022	Minggu	1	2	3
10.	10 Januari 2022	Senin	3	1	2
11.	11 Januari 2022	Selasa	2	3	1
12.	12 Januari 2022	Rabu	1	2	3
13.	13 Januari 2022	Kamis	3	1	2
14.	14 Januari 2022	Jumat	2	3	1
15.	15 Januari 2022	Sabtu	1	2	3
16.	16 Januari 2022	Minggu	3	1	2
17.	17 Januari 2022	Senin	2	3	1
18.	18 Januari 2022	Selasa	1	2	3
19.	19 Januari 2022	Rabu	3	1	2
20.	20 Januari 2022	Kamis	2	3	1
21.	21 Januari 2022	Jumat	1	2	3
22.	22 Januari 2022	Sabtu	3	1	2
23.	23 Januari 2022	Minggu	2	3	1
24.	24 Januari 2022	Senin	1	2	3
25.	25 Januari 2022	Selasa	3	1	2
26.	26 Januari 2022	Rabu	2	3	1
27.	27 Januari 2022	Kamis	1	2	3
28.	28 Januari 2022	Jumat	3	1	2
29.	29 Januari 2022	Sabtu	2	3	1
30.	30 Januari 2022	Minggu	1	2	3
31.	31 Januari 2022	Senin	3	1	2

Gambar. Jadwal Patroli, Siaga dan Off Januari 2022 Dinas Perhubungan Kota Binjai

(Sumber: Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Binjai, 2021))

Berdasarkan gambar 5 dapat diketahui bahwa dalam pengawasan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Binjai membagi petugas untuk berjaga di pos penjaga menjadi 3 regu dengan menetapkan jadwal patroli sebagaimana yang telah ditampilkan di atas. Setiap regu di bagi atas 3 jadwal penjagaan meliputi patroli, siaga dan off. Setiap regu yang berjaga pada pos penjagaan bekerja selama 24 jam penuh setiap hari dan dilakukan secara bergantian. Selanjutnya setelah melakukan observasi lapangan, penulis melihat bahwa proses pengawasan lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Binjai melalui pos jaga benar adanya.

Selain itu, penulis melihat bentuk pengawasan lalu lintas lainnya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Binjai yaitu pemantauan melalui *CCTV Control Room*. Terlihat beberapa rekaman kamera *CCTV* yang ada di monitor yang terkoneksi dengan 24 unit (*CCTV*) yang di pasang di titik-titik *traffic light* (lampu lalu lintas) yang bertujuan untuk

memantau arus lalu lintas serta mengendalikan kemacetan kemacetan di Kota Binjai yang juga terkoneksi dengan Binjai *Command Center* yang ada di Kantor Walikota Binjai. Melalui *CCTV Control Room* ini apabila terjadi kemacetan petugas lapangan akan turun mengatasi kemacetan, sehingga petugas lapangan tidak hanya berada di pos penjagaan. Dinas Perhubungan Kota Binjai juga sudah berinovasi seperti disebutkan di atas bahwa ada *CCRoom* seperti *Area Traffic Control System* (*ATCS*) masih konvensional namun bisa diakomodir dengan metode *radio link* dengan frekwensi tertentu yang terhubung dengan *CCTV* di setiap persimpangan yang terkoneksi dengan audio sehingga fungsinya sama dengan *ATCS* yang berbasis *fiber optik*. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan baik dari segi jumlah petugas yang berjaga dilapangan, fasilitas sarana dan prasana yang minim di mana salah satu pos penjaga meminjam tenda dari *BPPB* Kota Binjai, kerusakan *CCRoom* meliputi kendala jaringan dan cuaca yang pernah mengakibatkan *CCRoom* tidak bisa dioperasikan sebab tersambar petir. Selain itu kurangnya sosialisasi tertib lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Binjai kepada masyarakat. Sosialisasi tertib berlalu lintas akan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mempersiapkan diri dalam berkendara di jalan raya melalui pengenalan dasar rambu-rambu lalu lintas, etika berlalu lintas dan menghimbau untuk berkendara sesuai dan mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Kota Binjai. Agar tujuan tertib lalu lintas dapat terwujud, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kemudian dalam mengantisipasi serta mengurangi kemacetan lalu lintas yang ada di Kota Binjai, Dinas Perhubungan Kota Binjai memberlakukan jalan satu arah di titik kemacetan seperti jalan Sudirman.

Dengan berlakunya sistem satu arah maka parkir berada di sisi kanan jalur satu arah dan untuk sebelah kiri jalur satu arah adalah kawasan bebas parkir.

Secara keseluruhan peneliti menginterpretasikan bahwa kapasitas Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas ditinjau dari aspek program dan manajemen proses masih belum maksimal. Dilihat dari proses pengawasan lalu lintas yang dilakukan melalui penjagaan di pos setiap persimpangan masih terdapat kemacetan lalu lintas di beberapa titik-titik tertentu dan pemantauan melalui *CCRoom* untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak ada pos penjagaan, masih terdapat kendala yakni kerusakan akibat cuaca yang buruk sehingga tidak bisa diakses untuk beberapa saat. Dinas Perhubungan Kota Binjai belum mempunyai program yang jelas tentang pengawasan lalu lintas apalagi untuk mengikuti tahap-tahap seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu manajemen proses yang dilakukan meliputi pengawasan lalu lintas belum mengikuti *Standard Operasional Prosedure* (SOP) yang berlaku, saat melakukan observasi peneliti tidak mendapatkan informasi mengenai SOP, pedoman atau panduan yang jelas tentang kegiatan pengawasan lalu lintas. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas.

Jejaring Kerjasama dan Hubungan dengan Pihak Lain (*Networking And Linkages*)

Jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain menjadi aspek penting dalam sebuah organisasi, karena sebuah organisasi yang memiliki jaringan hubungan yang kompleks cenderung semakin berkembang. Namun dewasa ini, organisasi dan stafnya sering terkait erat dengan organisasi dan individu lain. Pemangku kepentingan dan mitra yang semakin beragam mendesak organisasi untuk melibatkan mereka dalam semua aspek pekerjaan suatu organisasi. Manajemen harus semakin

memperhatikan jaringan dan hubungan. Dalam hal ini kapasitas operasionalnya meliputi menilai mitra potensial, membangun kemitraan yang layak, outsourcing, negosiasi (Horton, 2003:25). Hubungan dan kerjasama dengan pihak lain dilihat dari bagaimana Dinas Perhubungan Kota Binjai memiliki dengan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain diluar lingkungan internalnya dengan membangun kemitraan yang layak dalam pengawasan lalu lintas di Kota Binjai sebagai bentuk peningkatan kapasitas organisasi secara keseluruhan. Dalam melakukan pengawasan lalu lintas, Dinas Perhubungan menjalin hubungan dan kerjasama dalam melakukan pengawasan lalu lintas dengan Satlantas Polres Binjai dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI). hubungan dan kerjasama antara Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Binjai, Satpol PP dan TNI adalah dalam bentuk bantuan untuk pendampingan di lapangan saat melakukan penertiban.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa hubungan dan kerjasama yang dibangun Dinas Perhubungan Kota Binjai dengan instansi terkait yakni dengan patroli gabungan untuk mengatasi kemacetan serta mengatur arus lalu lintas agar menjadi stabil. Namun hubungan dan kerjasama hanya sebatas pendampingan untuk penertiban di lapangan saat terjadi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. Koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perhubungan dan instansi terkait melalui proses dan tahapan mulai dari mengirim surat pendampingan untuk penertiban hingga pengumuman di grup *whatsapp*. Kemudian hubungan yang dibangun pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai hanya sebatas saat ingin mengadakan penertiban di lapangan. Bentuk komunikasinya pun saat Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai mengirim surat kepada Kepolisian Lalu Lintas dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk dimandatkan kepada pegawai yang akan ikut serta penertiban (Observasi, 21

Juli 2021).

Secara menyeluruh peneliti menginterpretasikan bahwa hubungan dan kerjasama yang dibangun Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam melakukan pengawasan lalu lintas belum optimal, bentuk koordinasi yang hanya sebatas saat ingin diadakannya penertiban lalu lintas dilapangan. Hubungan dan kerjasama dengan pihak lain sangat berpengaruh dalam meningkatkan kapasitas Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas menjadi lebih efektif dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari SDM teknis yang masih kurang, pendidikan dan pelatihan diadakan setahun sekali. Infrastruktur; teknologi dan keuangan belum memadai dilihat dari sarana dan prasana di Kantor Dinas Perhubungan Kota Binjai. Kepemimpinan Strategis menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas belum dilakukan secara maksimal, dilihat dari tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemimpin setiap tingkatan dalam suatu bidang dalam rangka memberdayakan anggotanya guna meningkatkan kinerja mereka dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Program dan Manajemen Proses menunjukkan bahwa tidak adanya program yang jelas mengenai pengawasan lalu lintas, hanya meliputi kegiatan-kegiatan seperti rekayasa lalu lintas, razia lalu lintas dan penertiban yang dalam pelaksanaannya belum efektif. Selain itu, Jejaring Kerjasama dan Hubungan dengan Pihak Lain belum optimal, Hal ini dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan hanya sebatas pendampingan untuk penertiban lalu lintas dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Horton, D. e. (2003). *Evaluating Capacity Development : Experiences From Research And Development Organizations Around The World*. The Netherlands;International Service for National Agricultural Research (ISNAR); Canada; International Development Research Centre (IDRC); The Netherlands; ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA)

Sedarmayanti. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Warpani, Suwardjoko.P. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Skripsi :

Rindani, Novia. 2022. *Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas*. Medan: USU.

Jurnal :

A.W.Cahyono., D.Guyana. (2021). Optimalisasi Kepemimpinan Nasional/Tni Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Tangguh Ditinjau Dari Perspektif Kepemimpinan Strategis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*. 8(2). 396-403. ISSN 2356-3966 E-ISSN: 2621-2331.

Grindle, Merilee S. (1997). *Divergent Cultures? When Public Organizations Perform Well in Developing Countries*. *World Development*. Harvard University, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. 25(4). 481-495.

Suryatin, Rita Anugerah & Novita Indrawati. (2019). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Infrastruktur, Komitmen Pimpinan, Dan Keteladanan Pimpinan Terhadap Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Pekbis*.11(1):43-54.

Regulasi :

Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Internet :

Hendra. 01 November 2017. Kondisi Lalin Kota Binjai Semrawut. <https://www.metro-online.co/2017/11/kondisi-lalin-kota-binjai-semrawut.html> diakses pada 21 Juli 2021

Wicaksono, Adi. 04 Februari 2021. Sensus Kendaraan di Indonesia: Lebih dari 133 Juta Unit. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210203115349-384-601700/sensus-kendaraan-di-indonesia-lebih-dari-133-juta-unit> diakses pada 21 Juli 2021